

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang sangat serius untuk ditangani oleh setiap Negara didunia adalah masalah kemiskinan. Dimensi kemiskinan sangat luas, maka tidak menutup kemungkinan untuk semua kalangan akan menghadapi permasalahan kemiskinan tersebut. Upaya meminimalisir kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup semua bagian kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu, maka dari itu kemiskinan adalah penyakit dalam ekonomi yang tidak dapat dihilangkan melainkan hanya bisa di dikurangi (Tonapa dkk., 2015).

Kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan ukuran pendapatan masyarakat, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Apabila dilihat berdasarkan pola waktu, kemiskinan dapat dibedakan menjadi empat, meliputi (1) *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun menurun; (2) *cyclical poverty*, merupakan kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan; (3) *seasonal poverty*, adalah kemiskinan musiman yang sering dijumpai pada kasus nelayan dan pertanian; dan (4) *accident poverty*, yaitu kemiskinan yang terjadi karena adanya bencana alam, konflik, dan kekerasan, atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (Sastramadja, 2003).

Adapun menurut ulama tafsir yakni Ibnu Katsir, melalui penafsirannya terhadap Qs. an-Nisā ayat 36:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾﴾

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri” (Qs. an-Nisā ayat 36).

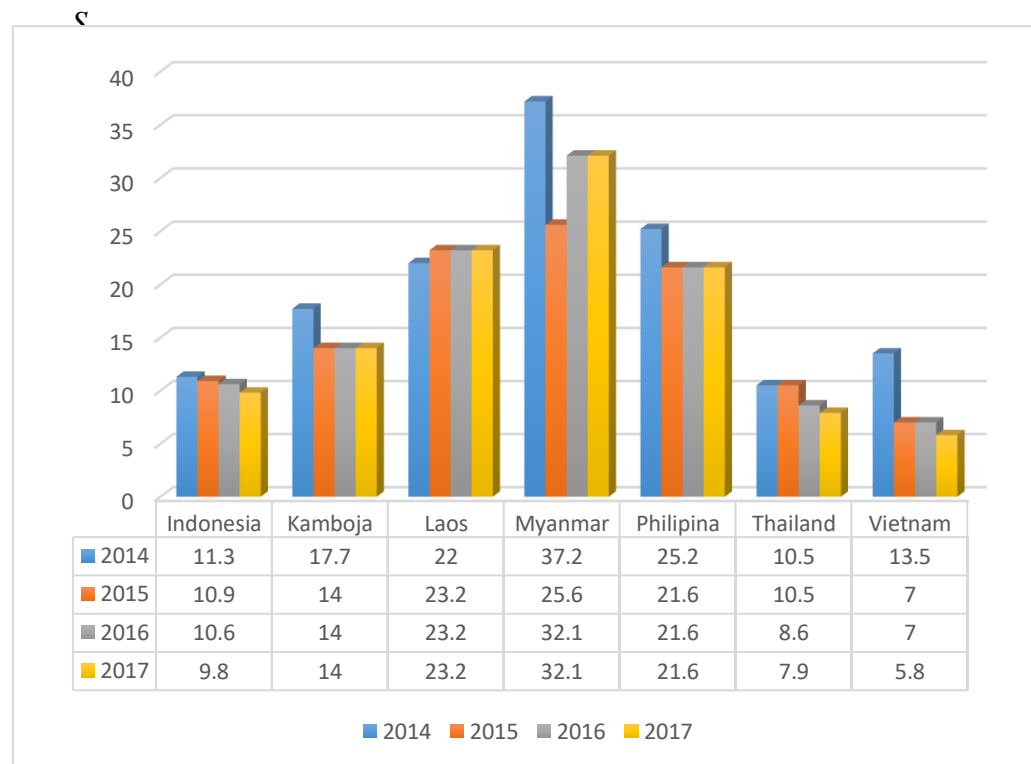
Ayat ini menjelaskan bahwa yang bernama miskin itu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, atau yang menurut bahasa seperti ucapan Ibnu Katsir, Orang miskin itu adalah orang yang terlantar dan terbuang di jalan. Beliau mengartikan miskin sebagai orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat dibelanjakan (Katsir, 2004). Miskin diartikan juga sebagai orang-orang yang membutuhkan yakni orang yang tidak mendapatkan pihak yang memenuhi kifayahnya. Maka Allah menyuruh manusia untuk membantu mereka dengan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya dan menghilangkan kemudaratannya (Katsir, 2004).

Menurut World Bank (2019), ada 10% dari total jumlah penduduk di dunia yang masih mengalami kemiskinan yang akut pada tahun 2015. Angka 10% tersebut, 5% diantaranya terdapat hanya di 5 negara saja, yakni India, Nigeria, Kongo, Bangladesh dan Ethiopia. Angka 10% tersebut dinilai telah mengalami penurunan dari angka kemiskinan ditahun 2013, namun penurunan tersebut cenderung lambat. Oleh karena itu, peningkatan investasi yang mendukung pengentasan kemiskinan, penurunan konflik antar negara, dan peredaman gejolak politik perlu diperhatikan di seluruh negara. Indonesia sendiri menyumbang 35,9 juta jiwa berada pada angka kemiskinan dunia pada tahun 2015. Ini menjadi hal positif mengingat dari 258 juta jiwa, hanya ada 10,9% masyarakat yang hidup kurang dari 1,9 USD per hari.

Kemiskinan biasanya sering terjadi di negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi sudah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 2005). Birokrasi yang kompleks juga ditenggarai menjadi penghambat pembangunan ekonomi, serta penegakan hukum yang masih lemah menjadi salah satu hambatan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang pada akhirnya mengurangi efektivitas pengentasan kemiskinan (Pratama, 2014).

Negara-negara anggota ASEAN yang tergolong negara berkembang diantaranya Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam.

Kemiskinan di negara-negara tersebut disebabkan karena tingginya tingkat kesenjangan yang merupakan salah satu masalah yang rumit untuk diselesaikan.



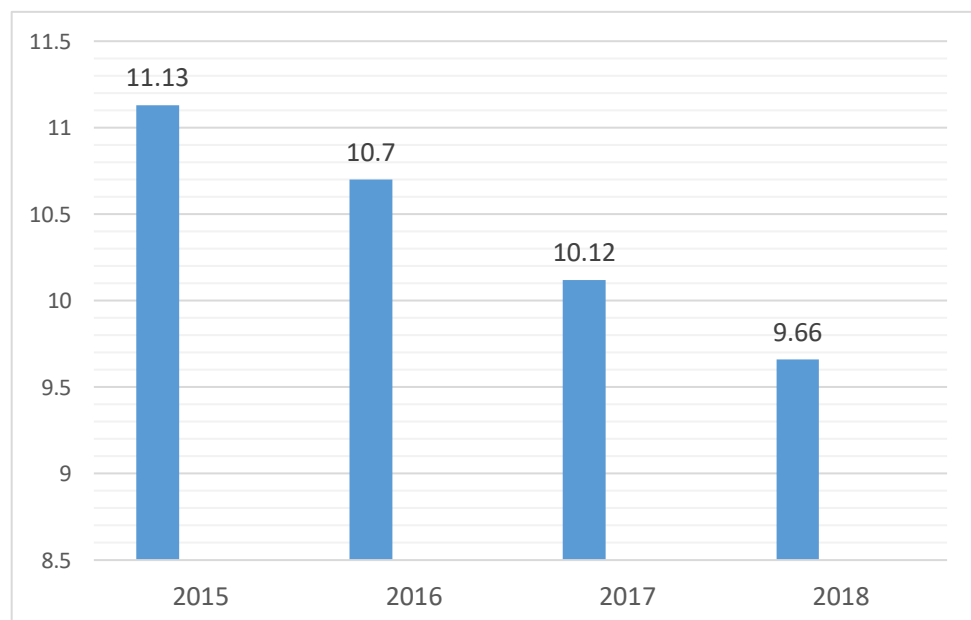
Sumber: Asian Development Bank, 2014-2017

GAMBAR 1. 1

Persentase Kemiskinan Negara ASEAN Tahun 2014-2017

Dari gambar 1.1, kemiskinan tertinggi dari tahun ke tahun berada di Negara Myanmar, dengan presentase penduduk miskin pada tahun 2014 sebesar 37.2%. Sedangkan pada tahun 2015 presentase penduduk miskin masih di tempati oleh Negara Myanmar dengan 25,6%, lalu pada 2016 dan 2017 presentase penduduk miskin masih ditempati oleh Negara Myanmar dengan 32.1%. Jadi Negara-negara ASEAN yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi tiap tahunnya ditempati oleh Negara Myanmar.

Kemiskinan di Negara Indonesia merupakan permasalahan sosial yang kompleks untuk di perbincangkan, hal tersebut merupakan suatu hal yang perlu diperdebatkan di sebuah forum internasional maupun nasional. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2011, mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2015-2018

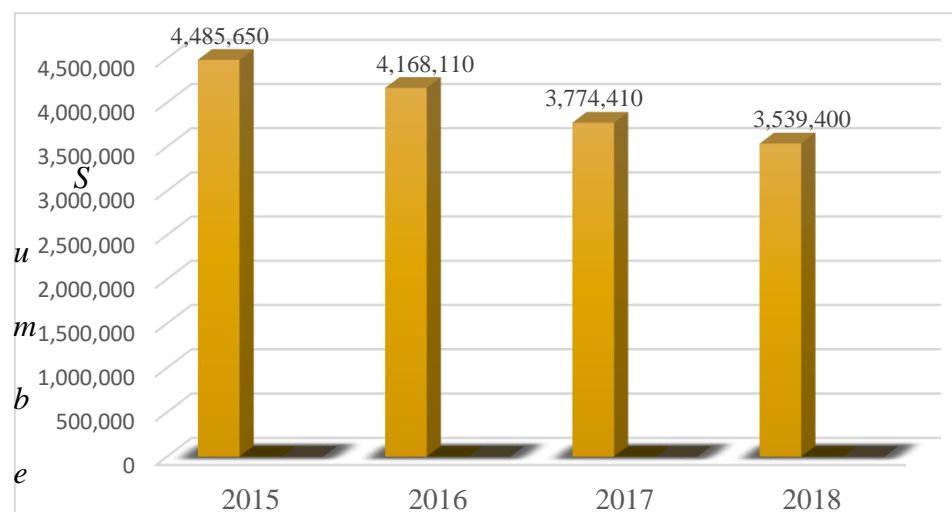
GAMBAR 1. 2
Persentase Kemiskinan Indonesia Tahun 2015-2018

Pada gambar 1.2, dapat disimpulkan bahwa kondisi kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 2015, kemiskinan di Indonesia sebesar 11,13%, lalu pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 10,7%, pada tahun selanjutnya yakni tahun 2017 mengalami penurunan kembali menjadi 10,12% dan pada tahun 2018 kemiskinan di Indonesia menjadi hanya 1 digit yakni sebesar 9,66%. Penurunan tersebut tentunya menjadi tren yang baik untuk Indonesia kedepannya, namun rasio penurunannya masih belum maksimal karena dari tahun ke tahun tidak ada penurunan yang mencapai 1%.

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang cukup besar dan ini menjadi hal yang sulit untuk menghindari hal kemiskinan tersebut. Kemiskinan merupakan masalah klasik yang bisa saja berupa soal pengangguran dan ketimpangan sosial yang sangat mendasar di Negara Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya jumlah penduduk miskin yang banyak berdomisili di pedesaan. Selain itu, masih banyak hal-hal yang dapat menyebabkan kemiskinan, seperti ketidakberdayaan, kekurangan kapasitas diri, krisis modal sosial dan lain sebagainya dengan menimbulkan masalah-masalah yang tidak sebatas permasalahan ekonomi saja, sehingga setiap lapisan masyarakat mempunyai peran sebagai upaya bersama mengentaskan kemiskinan.

Ada beberapa provinsi yang menyumbang angka kemiskinan cukup tinggi di Indonesia, salah satunya adalah provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang menjadi sorotan dalam pembahasan mengenai kemiskinan. Terhitung pada tahun 2015 hingga sekarang, provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin ketiga terbanyak di Indonesia dibawah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Meskipun jumlahnya sangat banyak akan tetapi dengan melihat statistik pada provinsi lain di Indonesia, provinsi Jawa Barat mampu menahan gejala sosial kemiskinan dengan penurunan-penurunan yang terjadi di setiap tahun tidak seperti provinsi lainnya yang ada di Indonesia yang sangat fluktuatif. Akan tetapi, penurunan tersebut masih belum sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2015-2018.



Sumberr: Badan Pusat Statistik Jawa Barat 2016-2019

GAMBAR 1. 3

Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018

Dari gambar 1.3, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Jawa Barat dalam kurun waktu 2015 sampai 2018 fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 4.485.650

jiwa. Pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali menjadi 4.168.110 jiwa, dan pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan masing-masing sebanyak 3.774.410 jiwa dan 3.539.400 jiwa.

TABEL 1. 1
Persentase Kemiskinan dan Target RPJMD Jawa Barat Tahun 2015-2018

Tahun	2015	2016	2017	2018
Persentase kemiskinan	9,57%	8,77%	7,83%	7,45%
Target RPJMD	6,8% -5,9%	5,9% -5%	7,97%	7,17%

Sumber: Rancangan akhir RPJMD Jawa Barat 2018-2023

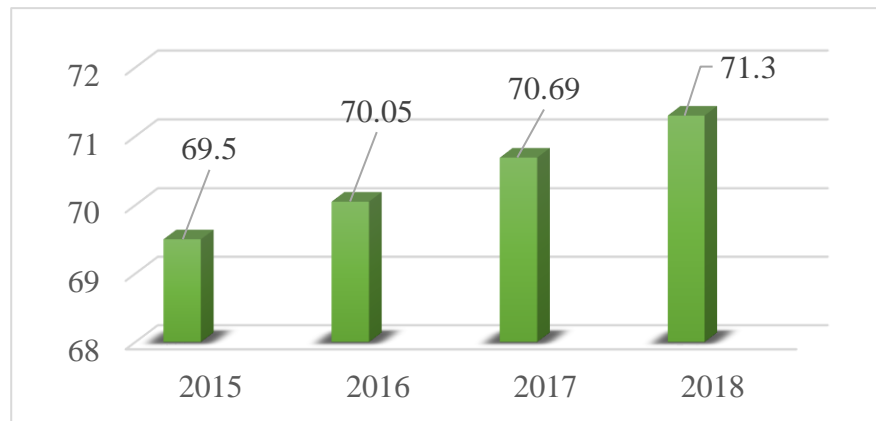
Dari tabel 1.1, persentase kemiskinan di provinsi Jawa Barat mengalami situasi yang fluktuatif pada tahun 2015 hingga 2018. Tercatat pada tahun 2015, tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Barat sebesar 9,57%, selanjutnya pada tahun 2016 hingga 2018 mengalami penurunan secara terus menerus masing-masing sebesar 8,77%, 7,83% dan 7,45%. Persentase kemiskinan tersebut tidak semua mencapai target RPJMD, tercatat hanya pada tahun 2017 saja yang mencapai target, sehingga ini menjadi tugas besar bagi pemerintah daerah provinsi Jawa Barat.

Dalam memahami masalah-masalah pada kemiskinan yang ada di Indonesia ini, tidak hanya tentang situasi ekonomi dan kesejahteraan saja namun perlu memperhatikan juga lokalitas di setiap masing-masing daerah, yaitu kemiskinan yang berada pada tingkat lokal yang sudah di tentukan oleh pemerintah setempat. Provinsi Jawa Barat terdiri dari 19 Kabupaten dan 8 Kota. Perubahan jumlah daerah otonom ini memiliki proses dan sejarah yang sangat panjang, yang terbaru adalah pada akhir tahun 2012, terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Pangandaran yang

sebelumnya merupakan daerah otonomi Kabupaten Ciamis, namun Kabupaten Pangandaran baru memiliki bupati pada tahun 2016.

Sumber daya manusia dari suatu bangsa merupakan faktor paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi dari bangsa yang bersangkutan. Tolak ukur yang digunakan di Indonesia adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang menjadi valuasi dari beberapa aspek seperti tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). IPM dapat mengindikasikan adanya heterogenitas setiap individu, taraf penghidupan manusia tidak serta merta diwakili dengan tingkat pendapatan saja akan tetapi kondisi sosial masyarakat menjadi rangkaian penting dalam pembangunan dan pembebasan masyarakat dari kemiskinan baik pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang (Todaro dan Smith, 2006).

Manusia menjadi pemeran inti di berbagai aspek kehidupan dengan kapasitas dan penghidupan yang dimiliki. Menurut Todaro dan Smith (2006), pembangunan manusia juga merupakan tujuan dari pembangunan itu sendiri, sehingga secara umum kekuatan kolektif sebuah negara ada pada kemampuan masing-masing individu sesuai dengan perannya masing-masing. Dengan kata lain, manusia berperan sebagai objek dan sekaligus subjek dalam memperbaiki pembangunan secara makro dalam suatu negara, sehingga dengan sendrinya tingkat kemiskinan dapat diturunkan seiring dengan meningkatnya pembangunan secara makro.



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat 2016-2019

GAMBAR 1. 4

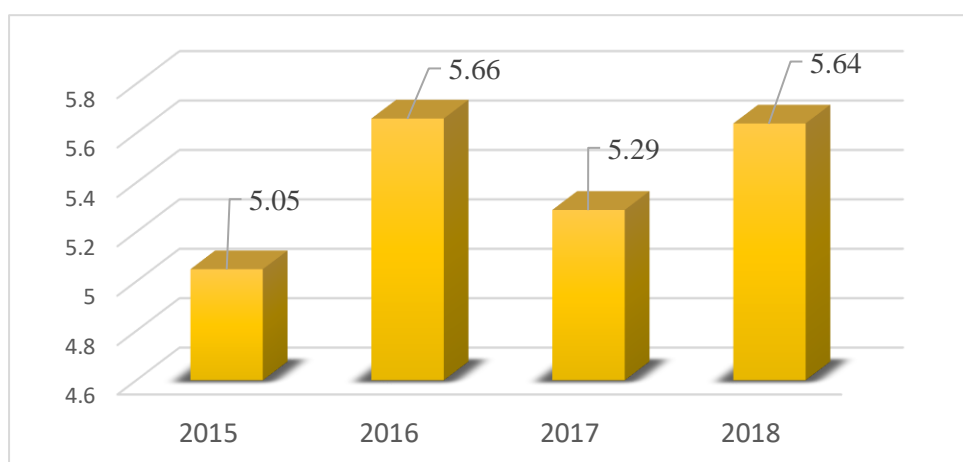
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018

Dari gambar 1.4, tingkat IPM di provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan pada periode tahun 2015-2018. Pada tahun 2015 tingkat IPM sebesar 69,5, lalu pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 70,05, lalu di tahun berikutnya mengalami peningkatan kembali menjadi 70,69 dan pada tahun 2018 peningkatan kembali terjadi yakni 71,3.

Selain IPM, laju pertumbuhan penduduk menjadi indikator penting dari penilaian pembangunan. Laju Pertumbuhan Penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh empat komponen yaitu: kelahiran (*fertilitation*), kematian (*mortalitation*), migrasi masuk, dan migrasi keluar (Subri, 2003).

Permasalahan akan timbul ketika jumlah penduduk yang sangat besar akan meningkatkan persaingan didunia kerja, apabila daya saing masyarakat di Provinsi Jawa Barat rendah, maka ini akan menjadi

permasalahan sosial yang sangat berbahaya dan jika tidak diantisipasi oleh pemerintah daerah akan menimbulkan dampak penumpukan masyarakat yang akan mengakibatkan gejala ekonomi yang kurang baik apabila tidak diimbangi dengan kualitas hidup yang layak. Akibat dari gejala ekonomi salah satunya adalah akan memperburuk tingkat kemiskinan. Namun sebaliknya apabila penduduk yang ada di Provinsi Jawa Barat dapat bersaing dan memiliki kualitas penduduk yang merata dan sama baiknya, maka setiap pertumbuhan penduduk yang terjadi akan dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang ada.



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat 2016-2019 (%)

GAMBAR 1. 5

Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018

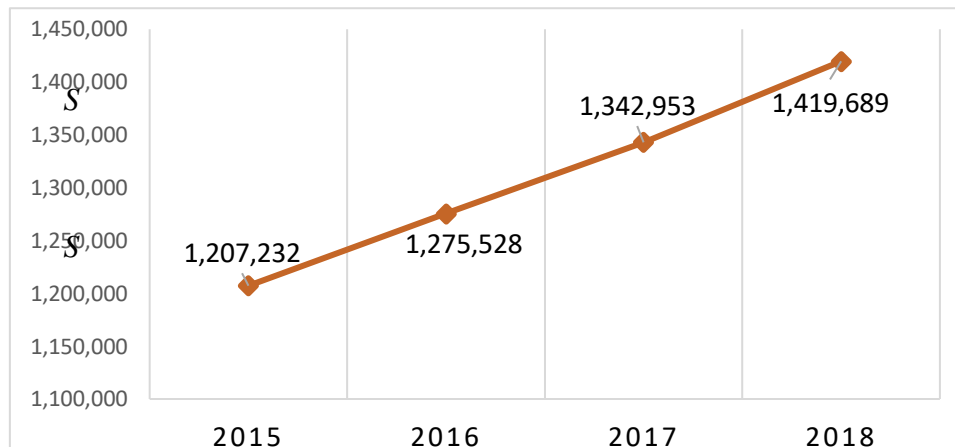
Pada gambar 1.5, laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2015-2018 mengalami keadaan yang fluktuatif. Tercatat pada tahun 2015 pertumbuhan penduduk sebesar 5,05%, pada tahun selanjutnya yakni 2016 mengalami peningkatan yakni 5,66%, kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 5,29% dan di tahun 2018

mengalami peningkatan menjadi 5,64%. Meskipun mengalami keadaan yang fluktuatif, namun kemiskinan di Jawa Barat tetap stabil di angka 5% pada tahun 2015-2018.

Kemiskinan juga dapat dikatakan apabila orang tersebut tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran yang menyebabkan kurangnya pendapatan, serta tingkat pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai. Untuk mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat terlepas dari bagaimana cara meningkatkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat itu sendiri, masalah pendidikan, tingkat kesehatan, laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah tersebut karena semua itu mempengaruhi kemiskinan.

Pembangunan struktur ekonomi yang ideal merupakan suatu mekanisme perencanaan dalam menentukan strategi agar semua keputusan yang diambil dapat berjalan tepat waktu dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia. Dalam keputusan ini data statistik mempunyai perencanaan yang sangat penting untuk strategi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan yang sudah tercapai untuk menentukan kebijakan yang akan datang. Tujuan dari pembangunan ekonomi ini untuk menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi yang ada, misalnya seperti perubahan sosial, mengurangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Ekonomi daerah bekerjasama antara pemerintahan sector privat dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada. Kemiskinan selalu

berkaitan dengan orang yang tidak mampu mencukupi hidupnya secara layak, namun juga berkaitan dengan adanya ketimpangan diantara penduduk yang berpenghasilan tinggi dengan penduduk yang berpenghasilan rendah (Hudiyanto, 2015).



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat 2016-2019

GAMBAR 1. 6

Nilai PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2015-2018 (miliar rupiah)

Pada gambar 1.6, Nilai PDRB di Provinsi Jawa Barat mengalami stabil meningkat disetiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2015 nilai PDRB provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 1.207.232, lalu pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.275.528, pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi Rp. 1.342.953 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp. 1.419.689.

Ketiga variabel di atas telah digunakan dalam beberapa penelitian sebelumnya, seperti halnya yang diteliti oleh Pratama (2014) yang menggunakan variabel IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, konsumsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dan pendapatan per kapita berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Dan juga variabel Laju Pertumbuhan Penduduk yang dilakukan oleh Masunah (2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penduduk dan tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Timur.

Dan variabel PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang dilakukan oleh Girsang dkk (2015). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, lalu variabel tingkat pendidikan, tingkat pengangguran dan kesempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menelaah lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul **“Determinan Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat Setelah Pemekaran Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015-2018”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaruh IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat setelah pemekaran wilayah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2015-2018?
2. Bagaimana pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat setelah pemekaran wilayah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2015-2018?
3. Bagaimana pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat setelah pemekaran wilayah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2015-2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat setelah pemekaran wilayah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2015-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh Laju pertumbuhan penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat setelah pemekaran wilayah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2015-2018.

3. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat setelah pemekaran wilayah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2015-2018.

D. Manfaat Penelitian

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan penelitian ini menghasilkan manfaat bagi pihak dan instansi yang terkait diantaranya:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah wawasan dalam berfikir terkait dengan masalah yang sedang diteliti yaitu mengenai Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pembangunan daerah.

- b. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pihak-pihak yang melakukan studi terkait pada penelitian selanjutnya.